# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## Kajian Pustaka

### Administrasi

Kebanyakan masyarakat mengenal administrasi sebagai aktivitas-aktivitas kantor, urusan surat menyurat atau yang sering disebut tata usaha. Namun administrasi pada intinya memiliki cakupan yang luas, yaitu administrasi sebagai seni sekaligus proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan kondisional. Sedangkan sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkadang pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administarasi itu berlangsung, harus diupayakan tercapainya tingkat dan mutu pekerjaan yang semakin meningkat.

Menurut **Siagian** dalam bukunya **Kerangka Dasar Ilmu Administrasi (2001:2)** mengemukakan pendapatnya mengenai administrasi, bahwa yang dimaksud administrasi adalah: **“Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan secara berdaya guna dan berhasil guna”**

Menurut **Fayol (1841-1925)**, **Administrasi bukan hak dan kewajiban semata-mata atau pun bukan pertanggung jawaban semata-mata dari pada pimpinan atau anggota pimpinan sendiri, tetapi tersebar luas ke seluruh anggota organisasi, bahkan buruh (pekerja) ikut serta sesuai tingkatnya dalam kegiatan administrasi**. Seperti halnya ada skala hierarki adanya dari jalur dari atas ke bawah dalam organisasi. Administrasi yang dikemukakan oleh **Fayol** diatas hampir sama dengan pendapat **Silalahi** dalam bukunya **Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi (2011:11)** merumuskan batasan tentang administrasi, yaitu :

**“Kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam stuktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.**

Kedua pendapat tersebut memiliki beberapa kesamaan, yaitu bahwa administrasi mencakup proses kerja sama dalam mencapai tujuan dan manfaat sumber daya yang ada. Berdasarkan pengertian administrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kelompok untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

### Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik diuraikan secara etimologis, maka Publik berasal dari Bahasa Latin *poplicius* yang semula dari kata *populous* atau *people* dalam bahasa Inggrisnya yang berarti rakyat. Administrasi juga berasal dari Bahasa Latin, yang terdiri dari kata *“Ad”*artinya *intensif* dan *ministrare* artinya melayani, jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara insentif. Objek dari Administrasi Publik adalah keseluruhan proses administrasi dibidang kenegaraan dalam rangka pencapaian tujuan Negara.

Banyak para ahli yang memberikan definisi salah satunya **oleh Inu Kencana Syafie** dalam bukunya **Ilmu Administrasi Publik (2006:22)** pada Administrasi Publik di antaranya:

Menurut **Jhon M. Pfiffner** dan **Robert V. Presthurs**

1. ***Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies***
2. ***Public Adminstration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of governments***
3. ***In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techiques larga numbers of people.***

**Jadi menurut Pfiffnerdan Presthurs anatar lain sebagai berikut:**

1. **Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik**
2. **Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorang dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah**.
3. **Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkut dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.**

**Sedangkan menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam bukunya**

1. ***Public Administration is Cooperative group effort in public setting***
2. ***Public Administration cover all three branches: executive, legislative aand judicial, and their interrelationships***
3. ***Public Administration has an important role formulating of public policy and is thus a part of the political process***
4. ***Public Administration is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community***
5. ***Public Administration is different in significant ways from private administration***

**Jadi menurut Nigro bersaudara ini :**

1. **Administrasi Publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan**
2. **Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan:eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka**
3. **Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam rumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.**
4. **Adminitrasi Publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat**
5. **Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.**

Dari definisi **Pfiffner**, **Prestus** dan **Nigro** memberikan beberapa pengertian untuk menjelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi public adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan keampuan dan keahlian untuk melaksankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

### Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia

### Kebijakan

Pada umunya kebijakan sering disebut dengan *policy*. *policy* diartikan kebijakan atau kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia menjadi dapat dibenarkan.Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan terjemahan dari kata *wisdom* yang berasal dari bahasa Inggris.

Menurut **Rusli** dalam bukunya Kebijakan Publik (2013:5) “Kebijaksanaan (wisdom) adalah pemikiran atau pertimbangan mendalam sebagai dasar bagi perumusan kebijakan (*policy*). Kebijaksanaan ialah ide pemikiran/pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan sebagai suatu strategi dalam mencapai satu tujuan”.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan , peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian kebijakan menurut para ahli untuk mempermudah memahami dan mengerti kebijakan. **Winarno** dalam bukunya **Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (2012:20)**

1. **Richard Rose kebijakan hendaknya dipahami “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beseerta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripaa sebagai suatu keputusan tersendiri”**
2. **Friedrich mendefinisikan “kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan - hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yan diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu**
3. **Andreson membuat definisi “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu maslah atau suatu persoalan**.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan yang berisikan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.

### Kebijakan Publik

Istilah kebijakan public sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis dalam ilmu politik. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin dapat dipandang sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, tetapi sebenarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan public dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut **Islamy** (2002), kebijakan publik serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dan menurut Dye (2002), *is whatever governments choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan).

Kebijakan publik di Indonesia biasanya berbentuk perundang-undangan. Ada beberapa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

### Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Menurut **Budi Winarno** dalam bukunya **Implementasi Kebijakan Teori, Proses, dan Studi Kasus (2012:35-37)**

1. **Tahap Penyusunan Agenda**

**Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda politik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama**

1. **Tahap Formulasi Kebijakan**

**Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat pilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan ”bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.**

1. **Tahap Adopsi Kebijakan**

**Dari setiap banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumusan kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga keputusan peradilan**

1. **Tahap Implementasi Kebijakan**

**Suatu program kebijakan hanya kan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor)*, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.**

1. **Tahap Evaluasi Kebijakan**

**Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapai masayarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuan satu kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan**

Secara sekema tertera pada gambar 2.1

Gambar 2. 1

**Tahap-tahap Kebijakan**

Penyusnan agenda

Formulasi kebijakan

Adopsi kebijakan

Implementasi kebijakan

Evaluas kebijakan

**Sumber : Buku Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus Budi Winanarno**

### Implementasi Kebijakan

Kata implementasi secara etimologis yaitu, aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan yang menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Implementasi kebijakan tahapan yang bersifat praktis, formulasi kebijakan tahapan bersifat teoritis, dalam proses kebijakan publik. Logikanya implementasi kebijakan bersifat top down, formulasi kebijakan bersifat *bottom up*.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

**Winarno** dalam **Bukunya Kebijakan Public, Teori, Proses Dan Studi Kasus (2012:148-149)** mengutip beberapa definisi implementasi kebijakan publik, anatra lain:

1. Rippley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yan terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan *benefit* atau suatu jenis keluaran yang nyata *tangible output*
2. Grindle berpendapat secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan *linkage* yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah
3. Van Meter dan Van Horn membatasi implementasii kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya.
4. **Model-model Implementasi Kebijakan**

Menurut G. Shabbir Chemma dan Dennis A Rondinelli (1983) dalam bukunya **Subarsono (2013)** ada empat variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni

1. Konidisi lingkungan, lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan
2. Hubungan antar organisasi, dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi, koordinasi, kerjasama dan konsistensi antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut.
3. Sumber daya organisasi, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia, dana, dan fasilitas. Selain sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pulak
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri - ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya

Menurut **Abidin (2004)** secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen berikut

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut :
   1. Rasional, artinya tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan factor pendukung, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional
   2. Diinginkan, artinya tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak

2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realitas. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan

1. Pemahaman : kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami bagaimana cara menjalankan kebijakan atau menerapkan kebijakan.
2. Ketepatan kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. Sementara itu, kebijakan didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak lengkap
4. Sosialisasi, sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses implementasi kebijakan yang telah dibuat akan bermanfaat bila di sosialisasikan. Suatu program kebijakan harus di sosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Sosialisasi di pandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas tersampaikan kepada penerima kebijakan. Ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal

### Komunikasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan komunikasi dua arah baik anatara *stakeholder* (kelompok kepentingan) maupun masyarakat untuk menyampaikan implementasi kebijakan yang baik dan benar.

Komunkasi merupakan proses yang menghubungkan berbagai komponen-komponen dari organisasi secara baik secara vertical maupun horizontal maupun diagonal. Pengkomunikasian merupakan salah satu fungsi manajer yang bertujuan agar orang, baik secara individu maupun kelompok, melalui siapa manjer mencapai tujuan mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan. Melalui komunikasi, manajer juga mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja mereka yang bermanfaat dan kurang bermanfaat untuk mecncapai tujuan-tujuan oragnisasi secara efektif dan efisien.

1. Pengertian komunikasi
2. Walhstroom (2011), Komunikasi adalah pernyataan diri yang efektif, perukaran pesan pesan yang tertulis, atau pesan-pesan dalam percakapan, bahkan pesan-pesan yang dikirim melalui imajinasi,pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau dengan metode lain, pengalihan informasi dari seorang kepada orang lain, pertukaran makna anatarpribadi dengan system symbol, dan proses pengalihan pesan melalui salura tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu.
3. Nurudin (2006:118) proses komunikasi adalah usaha menyampaian suatu gagasan untuk menerima umpan balik dari gagasan yang kita samapaikan
4. Hovland, Janis & Kelley, 1953 komunikasi adalah suatu proses melalaui mana sesorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk prilaku orang-orang lainnya (khayak).
5. Prinsip-prisip Komunikai Efektif

Berikut beberapa prinsip dasar untuk melakukan komunikasi yang efektif

1. *Respect* (persaan positif atau menghormati lawan bicara)
2. *Empathy* (kemampuan untuk menempatkaan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi ornag lain)
3. *Audible* (pesan dapat dimengerti dan dipahami)
4. *Clarity* (jelas)
5. *Humble* (rendah hati)
6. Fungsi-Fungsi Komunikasi

Secara umum ada lima kategori fungsi (tujuan) utama komunikasi, yaitu :

1. Fungsi informasi, yaitu sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima
2. Fungsi mendidik, yaitu sumber menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik atau mengubah stuktur pengetahuan penerima
3. Fungsi intruksi, yaitu seumber memberikan instruksi agar dilaksanakan penerima
4. Fungsi mempengaruhi, yaitu sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasive untuk mengubah persepsi, sikap, dan prilaku penerima
5. Fungsi menghibur, yaitu sumber menyebarluaskan infromasi untuk menghibur sambil memengaruhi penerima.

### Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu identitas anak yang menjadi simbol identitas bagi anak yang berumur dari 0-17 tahun yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

1. **Persyaratan Pembuatan KIA**

Tabel 2.1

Syarat Pembuatan KIA

|  |  |
| --- | --- |
| Pembuatan KIA untuk anak usia 0-5 tahun kurang satu hari | Pembutan KIA untuk anak usia **5-17** tahun kurang satu hari |
| 1. Fotocopy Akte Kelahiran dan menunjukan aslinya | 1. Fotocopy Akte Kelahiran dan menunjukan aslinya |
| 1. KK asli orangtua/wali | 1. KK asli orangtua/wali |
| 1. KTP-el asli orangtua | 1. KTP-el asli orangtua |
| 1. Pas foto anak berwarna ukuran 2 X 3 ( 2 lembar) |

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

1. **Proses dan Elemen Data Pada Kartu Identitas Anak (KIA)**

Gambar 2. 2

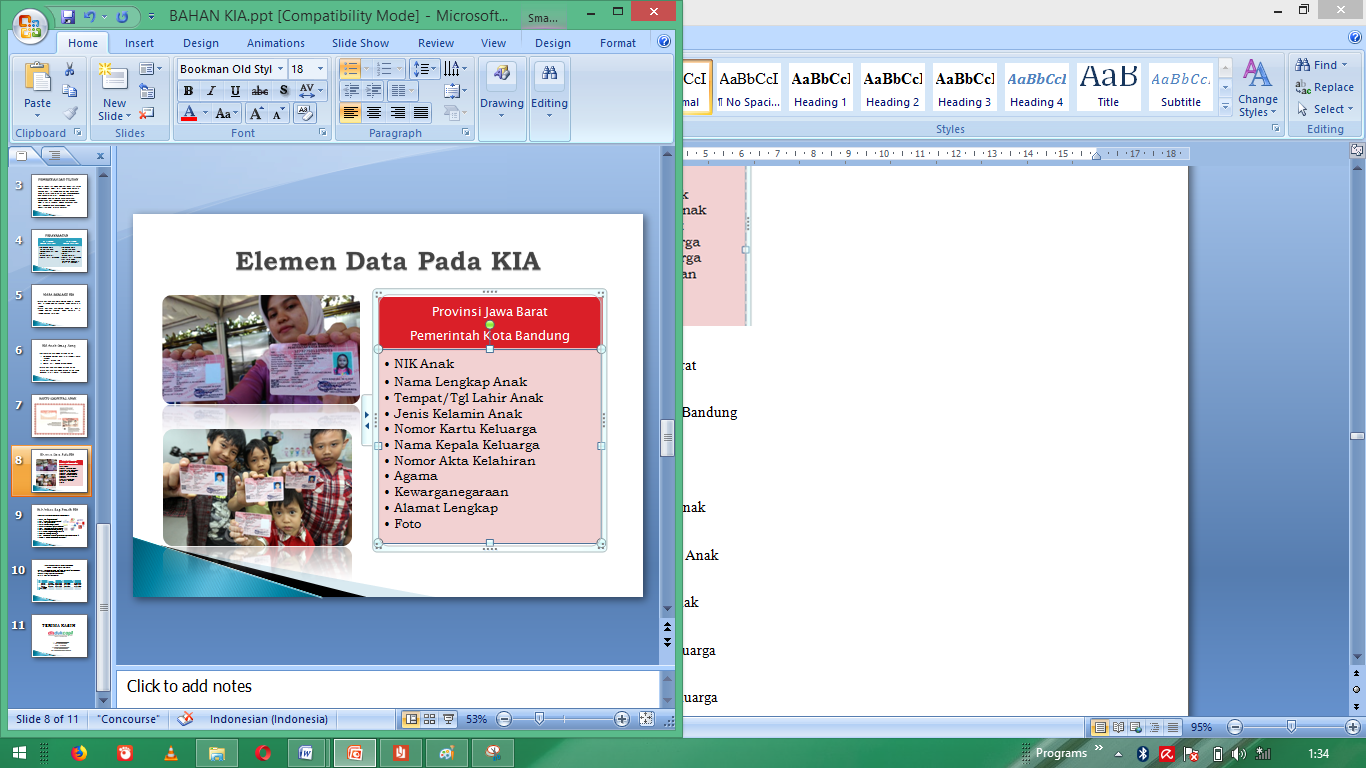
**PROSES DATA KIA**



**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

Gambar 2. 3

**ELEMEN PADA KIA**



**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

1. **Jenis-Jenis KIA**
   1. **KIA bagi anak yang berusia 0-5 tahun kurang satu hari, maka tidak dalam kartunya tidak ada foto**

Gambar 2. 4

KIA TANPA FOTO



**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

* 1. **KIA bagi anak yang berusia 5-17 tahun kurang satu hari maka ada foto**

Gambar 2. 5

**KIA DENGAN FOTO**

****

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung**

1. **Masa Berlaku KIA**
2. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun harus diganti dengan yang baru, agar dalam kartu tersebut terdapat foto maka jika digantikan dengan yang baru cukup bawa kartunya dan pas foto berwarna anak tersebut ukuran 2x3 sebanyak dua lembar
3. Masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari, maka anak tersebut kartu identitasnya digantikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP )

## Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini berdasarkan pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dnegan locos dan focus penelitian sebagai dasar pedoman untuk mengukur sejauh mana pedoman ini sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

Berdasarkan uraian tersebut yang telah ditemukan, peneliti mengajukan teori kebijakan menurut Menurut **Abidin** dalam bukunya  **(2004)** secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen berikut

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut :

a. Rasional, artinya tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan factor pendukung, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional

b. Diinginkan, artinya tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak

2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realitas. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan

a. Pemahaman : kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami bagaimana cara menjalankan kebijakan atau menerapkan kebijakan.

b. Ketepatan kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. Sementara itu, kebijakan didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak lengkap

a. Sosialisasi, sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses implementasi kebijakan yang telah dibuat akan bermanfaat bila di sosialisasikan. Suatu program kebijakan harus di sosialisasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang ingin dicapai. Sosialisasi di pandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas tersampaikan kepada penerima kebijakan. Ketidakjelasan informasi ini dapat menimbulkan interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal

## Proposisi

* + 1. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
    2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung